

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR CIBITUNG PERMAI
TAHUN 2024**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Cibitung Permai pada tahun 2023 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2024 ditengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan. BPR Cibitung Permai memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Cibitung Permai dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Depok. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Cibitung Permai didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Cibitung Permai. BPR Cibitung Permai senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah. Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Cibitung Permai selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan. Di sepanjang 2023 dan untuk di tahun-tahun mendatang, BPR Cibitung Permai terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB II

TRANSPARANS! PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
Nama	:	Janto Suhanto
NIK	:	3172012301660002
Jabatan	:	Direktur Utama yang Menjalani Fungsi Kepatuhan
Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ➤ Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank - Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. ➤ Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. ➤ Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. ➤ Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. ➤ Menetapkan langkah - langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang - undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati - hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang - undangan lain. ➤ Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang - undangan. ➤ Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. ➤ Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang - undangan lain yang relevan. ➤ Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris. ➤ Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR. 		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris : Nihil		
Penjelasan Lebih Lanjut : Nihil		

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
Nama	:	Emmy Sriharjanti, S.H. M.Hum
NIK	:	3275047112560041
Jabatan	:	Komisaris Utama
Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi ➤ Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank ➤ Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan ➤ Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya. ➤ Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris. 		

Nama	:	Shirley D. Lasul
NIK	:	3'17308491 0580005
Jabatan	:	Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi ➤ Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank ➤ Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan ➤ Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya. 		
Rekomendasi Kepada Direksi :		
<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat. c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR d. Memonitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat. e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2024 f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan. 		

g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.
Penjelasan Lebih Lanjut : Nihil

3. **Kelengkapan dan Pelaksanaan Komite (Jika Ada)**

a. **Tugas dan Tanggung Jawab Komite**

PT. BPR Cibitung Permai tidak Ada Kelengkapan dan Pelaksanaan Komite. BPR hanya memiliki Pejabat Eksekutif (PE) yaitu :

- PE Audit Internal
- PE Kepatuhan
- PE Manajemen Risiko
- PE APU PPT
- PE Kredit
- PE Operasional

b. **Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

PT. BPR Cibitung Permai tidak memiliki Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

c. **Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

PT BPR Cibitung Permai tidak memiliki Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

B. **Kepemilikan Saham Direksi**

1. **Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

Anggota Direksi PT. BPR Cibitung Permai Tidak memiliki saham di BPR

2. **Kepemilikan Saham Direksi pada Perusahaan Lain**

Anggota Direksi PT. BPR Cibitung Permai Tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain

C. **Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham**

1. **Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR

2. **Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga pada BPR

D. **Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**

1. **Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase
1	Emmy Sriharjanti, S.HM.Hum	3275047112560041	700.000.000	7,22 %
2	Shirley D. Lasut	3173084910580005	700.000.000	7,22 %

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga pada BPR

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	146.533.600	2	52.000.000
2	Tunjangan	-	-	-	-
3	Tantiem	-	-	-	-
4	Kompensasi Berbasis Saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
Total		1	146.533.600	2	52.000.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Mobil (1)	Tidak Ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (1)	Tidak Ada
4	Fasilitas Lainnya	BPJS Ketenagakerjaan (1)	Tidak Ada

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,46 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota	1 : 1

Dewan Komisaris yang terendah (b)	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,82 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,96 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
19 Februari 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan Bulanan & Laba Rugi Posisi 31 Januari 2024 ➤ Diharapkan Direksi mengupayakan Debitur yang masih punya plafon pinjaman agar mereka menggunakan plafon tersebut untuk membantu meningkatkan outstanding pinjaman ➤ Menggiatkan tim penagihan debitur – debitur bermasalah ➤ Tiap bulan harus mengirim laporan perkembangan debitur – debitur bermasalah kepada Komisaris ➤ Pemberian kredit baru sudah bisa dijalankan dengan catatan harus untuk debitur – debitur yang benar – benar baik dan juga dapat mencari debitur yang mampu melakukan back to back sehingga tidak ada resiko macet ➤ Pelajari biaya – biaya yang bisa dikurangi
04 April 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan Bulanan & Laba Rugi Posisi 31 Maret 2024 ➤ Diharapkan Direksi mengupayakan Debitur yang masih punya plafon pinjaman agar mereka menggunakan plafon tersebut untuk membantu meningkatkan outstanding pinjaman ➤ Menggiatkan tim penagihan debitur – debitur bermasalah ➤ Tiap bulan harus mengirim laporan perkembangan debitur – debitur bermasalah kepada Komisaris ➤ Pemberian kredit baru sudah bisa dijalankan dengan catatan harus untuk debitur – debitur yang benar – benar baik dan juga dapat mencari debitur yang mampu melakukan back to back sehingga tidak ada resiko macet ➤ Pelajari biaya – biaya yang bisa dikurangi
08 Juli 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan Bulanan & Laba Rugi Posisi 30 Juni 2024 ➤ Diharapkan Direksi mengupayakan Debitur yang masih punya plafon pinjaman agar mereka menggunakan plafon tersebut untuk membantu

		<p>meningkatkan outstanding pinjaman</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menggiatkan tim penagihan debitur – debitur bermasalah ➤ Tiap bulan harus mengirim laporan perkembangan debitur – debitur bermasalah kepada Komisaris ➤ Pemberian kredit baru sudah bisa dijalankan dengan catatan harus untuk debitur – debitur yang benar – benar baik dan juga dapat mencari debitur yang mampu melakukan back to back sehingga tidak ada resiko macet ➤ Pelajari biaya – biaya yang bisa dikurangi
07 Oktober 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan Bulanan & Laba Rugi Posisi 30 September 2024 ➤ Diharapkan Direksi mengupayakan Debitur yang masih punya plafon pinjaman agar mereka menggunakan plafon tersebut untuk membantu meningkatkan outstanding pinjaman ➤ Menggiatkan tim penagihan debitur – debitur bermasalah ➤ Tiap bulan harus mengirim laporan perkembangan debitur – debitur bermasalah kepada Komisaris ➤ Pemberian kredit baru sudah bisa dijalankan dengan catatan harus untuk debitur – debitur yang benar – benar baik dan juga dapat mencari debitur yang mampu melakukan back to back sehingga tidak ada resiko macet ➤ Pelajari biaya – biaya yang bisa dikurangi
09 Desember 2024	2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan Bulanan & Laba Rugi Posisi 30 November 2024 ➤ Diharapkan Direksi mengupayakan Debitur yang masih punya plafon pinjaman agar mereka menggunakan plafon tersebut untuk membantu meningkatkan outstanding pinjaman ➤ Menggiatkan tim penagihan debitur – debitur bermasalah ➤ Tiap bulan harus mengirim laporan perkembangan debitur – debitur bermasalah kepada Komisaris ➤ Pemberian kredit baru sudah bisa dijalankan dengan catatan harus untuk debitur – debitur yang benar – benar baik dan juga dapat mencari debitur yang mampu melakukan back to back sehingga tidak ada resiko macet ➤ Pelajari biaya – biaya yang bisa dikurangi
<p>Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :</p> <p>Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat setiap triwulan untuk mengevaluasi dan membahas atas hasil pengawasan terhadap operasional BPR terutama dari sisi</p>		

kinerja BPR, pelaksanaan fungsi Kepatuhan, pemantauan profil risiko, dan hal hal lain yang membutuhkan perhatian dan penjelasan dari Direksi.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Emmy Sriharjanti, S.H. M.Hum	3275047112560040			
2	Shirley D. Lasut	3173084910580005			
Penjelasan Lebih Lanjut : Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat setiap triwulan secara tatap muka untuk mengevaluasi dan membahas atas hasil pengawasan terhadap operasional BPR terutama dari sisi kinerja BPR, pelaksanaan fungsi Kepatuhan, pemantauan profil risiko, dan hal hal lain yang membutuhkan perhatian dan penjelasan dari Direksi.					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut :

Tidak ada Penyimpangan internal yang terjadi di BPR

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	2	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	2	0

Penjelasan Lebih Lanjut : Nihil

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK		
	Audia Michael Septian	Kepala Divisi Bagian Hukum Protelindo	3275042609860021	Shirley D Lasut	Komisaris	3173084910580005	Kredit	290
	Lauw Ping	Pemegang Saham Pengendali	3173081809560003	Emmy Sriharjanti, S.H. M.Hum	Komisaris Utama	3275047112560041	Kredit	2000
	PT Jayantara Setia Sejahtera	Kontruksi dan Instalasi Jaringan Telekomunikasi		Emmy Sriharjanti, S.H. M.Hum	Komisaris Utama	3275047112560041	Kredit	2200
	Pt. Sasana Angkasa Transit Hotel	Perhotelan		Emmy Sriharjanti, S.H. M.Hum	Komisaris Utama	3275047112560041	Kredit	6000
	Shirley D Lasut	Komisaris	3173084910580005	Emmy Sriharjanti, S.H. M.Hum	Komisaris Utama	3275047112560041	Kredit	150
	Turoyo	Sopir Pribadi Audia Micheal Septian	3303043006840002	Emmy Sriharjanti, S.H. M.Hum	Komisaris Utama	3275047112560041	Kredit	40

Penjelasan Lebih Lanjut : Kredit Pihak Tekait

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Tidak ada kegiatan pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik di tahun 2024

Kota Depok, 23 Januari 2025
PT. BPR Cibitung Permai

Disiapkan Oleh



Janto Suhanto
Direktur Utama

Disetujui Oleh



Emmy Sriharjanti S.H. M.Hum
Komisaris Utama